

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arab Saudi yang merupakan salah satu pemasok minyak bumi terbesar, mengharuskan negara bermayoritaskan muslim ini untuk membuat program Visi 2030. Program Visi 2030 Arab Saudi ini yang merupakan program unggulan yang akan membantu perekonomian Arab Saudi yang diumumkan oleh putra mahkota Arab Saudi yaitu Mohammad bin Salman pada tanggal 25 April 2016. Program Visi 2030 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada pendapatan dari sektor minyak bumi. Visi ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor lain, seperti layanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, rekreasi, teknologi dan pariwisata. Dengan mendiversifikasi ekonominya, Arab Saudi berharap dapat meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang tanpa terlalu bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, seperti minyak.

Minyak mentah menyumbang 30 sampai 40 persen untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bagi Arab Saudi dan sangat bergantung pada distribusi minyak. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak sudah menjadi tujuan Arab Saudi sejak era 1970, pelaksanaannya tidak konsisten dan harus mengikuti

harga minyak dunia (Nugraha, 2018). Dengan data yang diluncurkan oleh World Bank, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Arab Saudi melambat menjadi 1,7% pada 2019 yang disebabkan dikarenakan pengeluaran pemerintah Arab Saudi yang lebih tinggi sedangkan produksi minyak harus dipangkas karena tekanan dari OPEC (Putri, 2021). Disamping itu adanya terjadinya serangan terhadap fasilitas Aramco yang terjadi pada 14 September 2019 mengakibatkan pengurangan produksi minyak sebesar 5,7 juta barel perhari atau 5% dari pasokan global dunia (CNN, 2019). Data yang ditersebut menjadikan putra mahkota Mohammad bin Salman memfokuskan Arab Saudi dalam merealisasikan Visi 2030.

Ambisi Visi 2030 yang telah disampaikan oleh Mohammad bin Salman yaitu memiliki 3 pilar utama, pilar pertama yaitu *a vibrant society* atau masyarakat yang dinamis, yang dimana tujuannya adalah menjadikan masyarakatnya yang produktif di sektor swasta dan peningkatan terhadap kehidupan masyarakat serta meningkatkan pelayanan umrah. Pilar kedua yaitu *a thriving economy* yang dimana pilar ini memfokuskan terhadap diversifikasi ekonomi Arab Saudi yakni *rewarding opportunities, investing for the long-term, open for business* dan *leveraging its unique position*. poin tersebut ingin memaksimalkan investasi, kerjasama antar Kawasan, privatisasi perusahaan nasional Arab Saudi dalam vision 2030. Pilar ketiga atau terakhir yaitu *an ambitious nation* yang berfokus untuk menciptakan transparan, akuntabel dan efektif dalam pemerintah Arab Saudi (Hikmah, 2019). Arab Saudi dibawah

kekuasaan Raja Salman juga memiliki tujuan yang mereka ingin capai melalui Visi 2030, adapun beberapa tujuan dari Visi 2030 yaitu (Ramadhan, 2021):

- 1) Menambah pendapatan pemerintah di sektor non-minyak yang sebelumnya 163 miliar riyad menjadi 1 triliun riyal
- 2) Memberikan ruang sektor swasta dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari 40 persen menjadi 65 persen
- 3) Meningkatkan investasi langsung asing (FDI) dari 3,8 persen menjadi 5,7 persen
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia yaitu meningkatkan peran perempuan 22 persen menjadi 30 persen.
- 5) Menambah lokalisasi sektor gas dan minyak dari 40 persen menjadi 75 persen.

Keinginan Arab Saudi melakukan transformasi ekonomi yang signifikan dengan menjalankan Visi 2030 dan untuk dapat merealisasikannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan Arab Saudi yaitu melakukan kerjasama melalui hubungan bilateral dengan negara maju yang akan memainkan peran yang penting dalam mempercepat tercapainya Visi 2030 di Arab Saudi. Dengan melakukan hubungan bilateral dengan negara maju, Arab Saudi dapat memperoleh keahlian, teknologi, modal dan pengalaman yang dimiliki oleh negara maju demi mencapai tujuan putra mahkota Mohammad bin Salman yaitu Visi 2030.

Arab Saudi telah menjalin hubungan negara maju seperti Amerika Serikat sejak abad awal ke 20, kerjasama yang dilakukan berupa perizinan eksploitasi minyak di Arab Saudi dan perjanjian perlindungan untuk Arab Saudi atas intervensi negara-negara yang terlibat perang di perang dunia II. Meningkatnya produksi minyak Amerika Serikat menyebabkan harga minyak menjadi anjlok sehingga berkurangnya pasar minyak Arab dan negara-negara pengekspor minyak.

Kedekatan Mohammad bin Salman dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutunya, sangat mempengaruhi atas kebijakan-kebijakannya untuk membuat Arab Saudi lebih terbuka terhadap pemahaman lain, demi mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Mohammad bin Salman memberikan perubahan salah satunya pemberian hak terhadap perempuan di Arab Saudi seperti keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi sehingga memudahkan negara-negara seperti Amerika Serikat. Perubahan yang dilakukan oleh Mohammad bin Salman seperti mendatangkan AMC, perusahaan bioskop terbesar di Amerika Serikat dan bekerjasama dengan perusahaan multinasional yaitu Hyatt Hotel yang berpusat di Chicago dan salah satu proyek dari Visi 2030 yaitu di bangunnya Qiddiya, tempat wisata di Amerika Serikat yang bertema *six flags*, dimana tempat wisata ini akan menampilkan dan memamerkan budaya dan sisi lain dari Arab Saudi. Tidak hanya perubahan itu saja tetapi Mohammad bin Salman telah menerbitkan visa turis untuk pertama kalinya yang dimana sekitar 49 negara seperti Amerika

Serikat, Australia dan sejumlah negara eropa dapat dengan mudah mendapatkan visa tersebut.

Arab Saudi bertekad untuk memperkuat dan mendiversifikasi kemampuan ekonominya, mengubah kekuatan utamanya menjadi perangkat yang memungkinkan masa depan yang sepenuhnya terdiversifikasi. Pada Februari 2022, Arab Saudi mengalihkan 4% saham Saudi Aramco ke Dana Investasi Publik (PIF), senilai sekitar \$80 miliar (Gulf News, 2022). Langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang kerajaan untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak, sesuai dengan tujuan Visi 2030. Meskipun saham ini tetap milik negara, PIF sekarang memiliki lebih banyak leverage finansial untuk berinvestasi di sektor-sektor lain, termasuk teknologi dan infrastruktur global. Langkah ini tidak secara langsung melibatkan transfer teknologi, tetapi bertujuan meningkatkan pendanaan PIF untuk mendukung investasi di luar negeri, termasuk Amerika Serikat, demi mencapai diversifikasi ekonomi. (Abuljadayel, 2022)

Public Investment Fund (PIF) merupakan dana kekayaan negara yang didirikan oleh Arab Saudi pada tahun 1971 dengan tujuan utama untuk mendiversifikasi ekonomi negara tersebut dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak (Bazoobandi, 2021). Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, PIF berfokus pada investasi di berbagai sektor yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik dan menciptakan

lapangan kerja. Dengan demikian, PIF telah menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia (Global SWF, 2023).

Visi 2030 mencanangkan PIF menjadi salah satu lembaga dana kekayaan negara terbesar di dunia, dengan aset yang dikelola melebihi \$2 triliun pada tahun 2030 (Bazoobandi, 2021). Dana ini bertujuan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan investasi global Arab Saudi, dan mendorong inovasi di dalam kerajaan. Melalui investasinya di berbagai sektor non-minyak, PIF juga bekerja untuk melokalkan industri dan membangun kemitraan internasional strategis yang akan mendorong kemajuan teknologi dan industri di Arab Saudi.

Salah satu fitur yang paling menonjol dari strategi PIF adalah fokusnya pada proyek-proyek berskala besar, termasuk pengembangan NEOM, sebuah kota futuristik yang mengintegrasikan teknologi pintar, dan Proyek Laut Merah, yang bertujuan untuk mengubah kerajaan menjadi pusat pariwisata global. Dengan memprioritaskan inisiatif-inisiatif tersebut, PIF tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memposisikan Arab Saudi sebagai pemain yang kompetitif di pasar global.

Selain itu, strategi investasi PIF tidak hanya mencakup proyek-proyek domestik, tetapi juga usaha-usaha internasional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. PIF telah melakukan investasi yang signifikan di perusahaan-perusahaan teknologi seperti Uber, Lucid Motors, SoftBank Vision Fund dan AMC Entertainment

yang memposisikan Arab Saudi di garis depan pasar teknologi global (Bazoobandi, 2021). Dengan demikian, PIF membentuk kembali lanskap ekonomi kerajaan, membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi harga minyak global dan guncangan eksternal.

(PIF) Arab Saudi telah berinvestasi secara strategis dalam ekuitas AS sebagai bagian dari misi yang lebih luas untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dari ketergantungan pada minyak, sejalan dengan Visi 2030. Dengan meningkatkan kehadirannya di pasar AS, PIF bertujuan untuk mendapatkan eksposur ke sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti teknologi, keuangan, dan barang-barang konsumen, bidang-bidang di mana AS tetap menjadi pemimpin global. Investasi di perusahaan-perusahaan seperti Meta Platforms, Microsoft, dan Nvidia mencerminkan minat PIF untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi canggih, yang dapat mendukung tujuan Arab Saudi untuk menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berbasis pengetahuan. (Bazoobandi, 2021)

Selain itu, pasar AS menarik karena stabilitas, likuiditas, dan potensi imbal hasil yang tinggi. Investasi PIF di perusahaan-perusahaan seperti Ermenegildo Zegna NV, NU Holdings, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar menawarkan peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, sekaligus membantu PIF membangun portofolio yang lebih seimbang dan tahan banting sehingga tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga minyak (Bazoobandi, 2021).

Selain itu, berinvestasi di ekuitas AS memungkinkan PIF untuk mengembangkan kemitraan strategis dan visibilitas global, memposisikan Arab Saudi sebagai pemain penting di panggung ekonomi dunia. Hal ini juga meningkatkan kemampuan PIF untuk mencapai targetnya menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan aset yang diproyeksikan melebihi \$2 triliun pada tahun 2030. Melalui investasi ini, PIF tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga akses ke teknologi dan pasar baru yang dapat mendorong pembangunan dalam negeri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba melihat dampak dan prospek yang dihasilkan dari kerjasama di bidang investasi Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk mewujudkan Visi 2030, judul yang dirumuskan oleh penulis yaitu “kerjasama Amerika Serikat dan Arab Saudi di bidang investasi dalam mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi” Penulis memilih judul tersebut dengan beberapa alasan yang mendalam dan relevan yaitu : Pertama, Visi 2030 merupakan rencana ambisius yang diluncurkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Fokus pada bidang investasi dalam kerangka ini sangat penting karena investasi, baik domestik maupun asing, merupakan kunci untuk mencapai tujuan-tujuan Visi 2030. Kedua, Amerika Serikat adalah salah satu mitra ekonomi terbesar atau utama Arab Saudi, dengan sejarah panjang kerjasama di berbagai sektor. Dalam konteks Visi 2030, hubungan investasi antara kedua

negara menjadi semakin strategis, dengan peluang investasi di sektor-sektor baru seperti teknologi, infrastruktur, dan kesehatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan pada kerjasama investasi yang akan dilakukan oleh Saudi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di beberapa sektor strategis yang dilakukan pada tahun awal diumumkannya Vision 2030, yaitu tahun 2016-2024. Berdasarkan Batasan di atas, penulis mengajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kerjasama Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang investasi dalam mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi?
2. Bagaimana dampak dan prospek kerjasama Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang investasi dalam mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang investasi dalam mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi.

2. Bagaimana dampak dan prospek kerjasama Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang investasi dalam mewujudkan Visi 2030 Arab Saudi.

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman pada pembaca tentang bagaimana dampak dan prospek dalam suatu investasi yang dilakukan oleh suatu negara yang akan mempengaruhi tujuan suatu visi negara tersebut.
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti berikutnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai Visi 2030 Arab Saudi

D. Kerangka Konseptual

a. Hubungan Bilateral

Kerjasama diantara sebuah aktor negara dilakukan demi memenuhi keinginan sesama negara atau mengantisipasi atas tindakan negara yang melakukan sebuah hubungan kerjasama tersebut. Negara yang melakukan hubungan kerjasama biasanya melakukan negosiasi secara tawar menawar mau itu secara jelas atau diam-diam. Hubungan kerjasama didalam Hubungan Internasional terbagi atas 3 yaitu: kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, kerjasama regional. Yang dimana kerjasama bilateral dilakukan hanya oleh dua negara tidak lebih

dan berfokus menjalin hubungan demi mendapatkan keinginan negara setiap negara.

Kerjasama bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama melalui pertukaran sumber daya, informasi, dan investasi. Menurut Keohane dan Nye (1977), kerjasama ini dibangun atas dasar kepentingan nasional yang saling menguntungkan dan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam konteks kerjasama antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, investasi menjadi salah satu aspek kunci yang mendukung inisiatif Visi 2030 Saudi Arabia. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan strategis yang lebih luas, seperti diversifikasi ekonomi Saudi dan penguatan posisi AS di Timur Tengah. Dengan adanya kerjasama bilateral ini, kedua negara dapat saling memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas di kawasan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kerjasama yang dijelaskan dalam teori hubungan internasional.

Menurut politik internasional, kerjasama bilateral mencerminkan hubungan saling berpengaruh atau timbal balik antara para aktor. Kerjasama bilateral dalam hubungan internasional melibatkan dinamika yang kompleks dan luas. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral berharap mendapatkan keuntungan

bagi kedua belah pihak. Dinamika hubungan bilateral membutuhkan kebijakan yang menghindari pelanggaran dan kerugian di negara lain. Hubungan ini juga dapat memperkuat kerukunan antar negara.

Kerjasama bilateral antara negara sering melibatkan sektor politik, budaya, sejarah, ekonomi, dan sosial. Kekuatan hubungan bilateral dapat dilihat dari kerjasama antara lembaga, pejabat tingkat administrasi politik, akademik, swasta, dan masyarakat sipil. Sektor yang terlibat dalam kerjasama bilateral meliputi investasi, pertukaran pengetahuan umum, pertukaran budaya, dan kesadaran masyarakat tentang negara lain untuk memperkuat ikatan bersama.

Dengan demikian, kerjasama bilateral dalam hubungan internasional memiliki cakupan yang luas dan kompleks, melibatkan berbagai aspek kehidupan antar negara dan bertujuan untuk mencapai keuntungan Bersama.

b. Konsep Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi merupakan strategi yang diterapkan oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor ekonomi, terutama yang rentan terhadap fluktuasi pasar global, seperti sektor minyak dan gas. Dalam konteks Hubungan Internasional, diversifikasi ekonomi menjadi sangat relevan bagi negara-negara yang ingin meningkatkan stabilitas ekonomi,

memperkuat posisi geopolitik, dan mengurangi risiko ekonomi yang disebabkan oleh ketergantungan pada sumber daya tertentu.

Diversifikasi ekonomi mengacu pada proses dimana sebuah perekonomian memperluas jangkauan aktivitasnya di luar satu sektor dominan untuk mencakup berbagai industri. Konsep ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, mendorong stabilitas, dan menciptakan peluang untuk pembangunan berkelanjutan.

Diversifikasi lebih dari sekadar menambah sektor-sektor baru- ini membutuhkan transformasi ekonomi dengan cara meningkatkan kompleksitas dan keragaman. Sektor-sektor yang secara tradisional dominan, seperti minyak dalam kasus Arab Saudi, sering kali menghadapi volatilitas dan guncangan eksternal seperti fluktuasi harga. Sebaliknya, ekonomi yang terdiversifikasi tidak terlalu rentan terhadap guncangan-guncangan ini karena risikonya tersebar di berbagai sektor.

Dari segi landasan teori dari Andy Stirling berpendapat bahwa keanekaragaman sangat penting untuk ketahanan ekonomi (Stirling, 2007). Kerangka kerja Stirling mengukur keragaman dengan melihat tiga aspek inti: variasi, disparitas, dan keseimbangan. Keragaman mengacu pada jumlah sektor yang berbeda, disparitas mengukur seberapa berbeda sektor-sektor tersebut satu sama lain, dan keseimbangan menilai seberapa merata sektor-sektor tersebut di seluruh perekonomian (Hartmann, 2018). Kerangka kerja ini sangat penting

dalam memahami bagaimana diversifikasi ekonomi dapat diukur dan potensi dampaknya.

Perspektif kunci lainnya diberikan oleh Saviotti dan Frenken, yang membedakan antara diversifikasi ekonomi terkait dan tidak terkait. Diversifikasi terkait terjadi ketika sebuah perekonomian berekspansi ke sektor-sektor yang terkait erat dengan industri yang sudah ada (Saviotti & Frenken, 2008). Contohnya, Arab Saudi dapat melakukan diversifikasi ke sektor petrokimia atau energi terbarukan, yang terkait erat dengan industri minyak yang sudah ada. Diversifikasi yang tidak terkait, di sisi lain, melibatkan percabangan ke sektor-sektor yang sama sekali baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan industri yang ada. Kedua bentuk diversifikasi ini diperlukan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang (Hartmann, 2018).

Dalam Visi 2030 Arab Saudi, diversifikasi ekonomi merupakan inti dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Tujuannya adalah untuk memperluas ke sektor-sektor seperti pariwisata, keuangan, dan teknologi. Rencana ambisius ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan investasi asing, dan memodernisasi ekonomi. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa ekonomi yang terdiversifikasi memberikan lebih banyak peluang untuk pertumbuhan dengan memanfaatkan aliran

pendapatan yang berbeda, yang pada gilirannya membuat ekonomi lebih kuat dan berkelanjutan (Hartmann, 2018).

Dukungan kelembagaan merupakan faktor penting lainnya dalam mencapai diversifikasi ekonomi yang sukses. Seperti yang disoroti oleh Saviotti dan Frenken (2008), diversifikasi sering kali membutuhkan investasi yang besar dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan institusi. Negara-negara perlu mengembangkan keterampilan baru, sistem pendidikan, dan kerangka kerja hukum yang mendukung inovasi dan diversifikasi. Sebagai contoh, langkah Arab Saudi untuk mengembangkan sektor teknologinya membutuhkan institusi pendidikan dan kebijakan baru yang mendorong inovasi, kewirausahaan, dan investasi asing (Hartmann, 2018).

Namun, salah satu tantangan utama adalah bahwa diversifikasi ekonomi tidak secara otomatis mengarah pada pemerataan kekayaan atau pembangunan manusia. Diversifikasi ke sektor-sektor berupah rendah mungkin tidak akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, sementara fokus pada sektor-sektor bernilai tinggi dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Selain itu, ada risiko yang terkait dengan diversifikasi yang terlalu banyak. Kompleksitas yang berlebihan dapat menyebabkan kelumpuhan keputusan atau kesalahan alokasi sumber daya, terutama jika ekonomi

tidak dipersiapkan dengan baik untuk sektor-sektor baru (Hartmann, 2018).

Diversifikasi ekonomi sangat penting untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama dalam perekonomian yang sangat bergantung pada satu sektor. Namun, proses ini membutuhkan perencanaan yang matang, investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan, serta reformasi kelembagaan untuk memastikan bahwa sektor-sektor baru tidak hanya tercipta, tetapi juga berkelanjutan dan mampu berkontribusi pada pembangunan manusia secara keseluruhan. Visi 2030 Arab Saudi mencontohkan upaya strategis untuk mendiversifikasi ekonominya dengan berekspansi ke sektor-sektor seperti pariwisata, keuangan, dan teknologi, sembari mengatasi tantangan seperti volatilitas sektoral dan kebutuhan akan reformasi institusional.

c. Foreign Direct Investment

Menurut Krugman (1991), Foreign Direct Investment (FDI) mengacu pada arus modal internasional di mana sebuah perusahaan dari satu negara memperluas atau mendirikan operasinya di negara lain. Selain hanya memindahkan dana, FDI juga melibatkan pengendalian dan pengelolaan perusahaan di luar negeri. Ini mencakup investasi dalam bentuk modal, teknologi, dan pengelolaan perusahaan asing.” (Caves, 1996). Investasi Asing Langsung (Foreign Direct

Investment/FDI) merupakan bentuk dukungan jangka panjang yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain dalam berbagai bidang seperti manajemen, usaha patungan, alih teknologi, dan konsultasi ahli. Terdapat beberapa jenis FDI, yaitu investasi asing langsung masuk, investasi asing langsung keluar, serta cadangan investasi asing langsung. Konsep yang sangat cocok untuk di aplikasikan dalam konteks Investasi Arab Saudi dengan Amerika Serikat.

Dalam kontekes Foreign Direct Invesment, negara seperti Arab Saudi yang ingin membangun negaranya agar penghasilan negara tidak hanya bergantung pada minyak dihadapkan oleh beberapa investasi asing yang dibutuhkan untuk mengembangkan beberapa pendapatan dari berbagai sektor. Panayotou menjelaskan FDI dapat menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran modal atau portofolio, karena jika suatu negara melakukan FDI akan diikuti transfer of technology, management skill, resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable (Sarwedi, 2002). Dengan berinvestasi dengan beberapa perusahaan teknologi, asuransi, hiburan, energi dan manufaktur sangat memungkinkan jika menganalisis menggunakan teori tersebut.

Menurut teori keterkaitan ekonomi yang dikemukakan oleh Markusen dan Venables (1998), FDI menciptakan efek spillover yang memperkuat sektor domestik di salah satu negara. Dalam konteks ini, kita bisa membalikkan konsep ini untuk menunjukkan bagaimana

investasi di perusahaan Amerika dapat memperkuat dan mengembangkan sektor-sektor strategis di Arab Saudi.

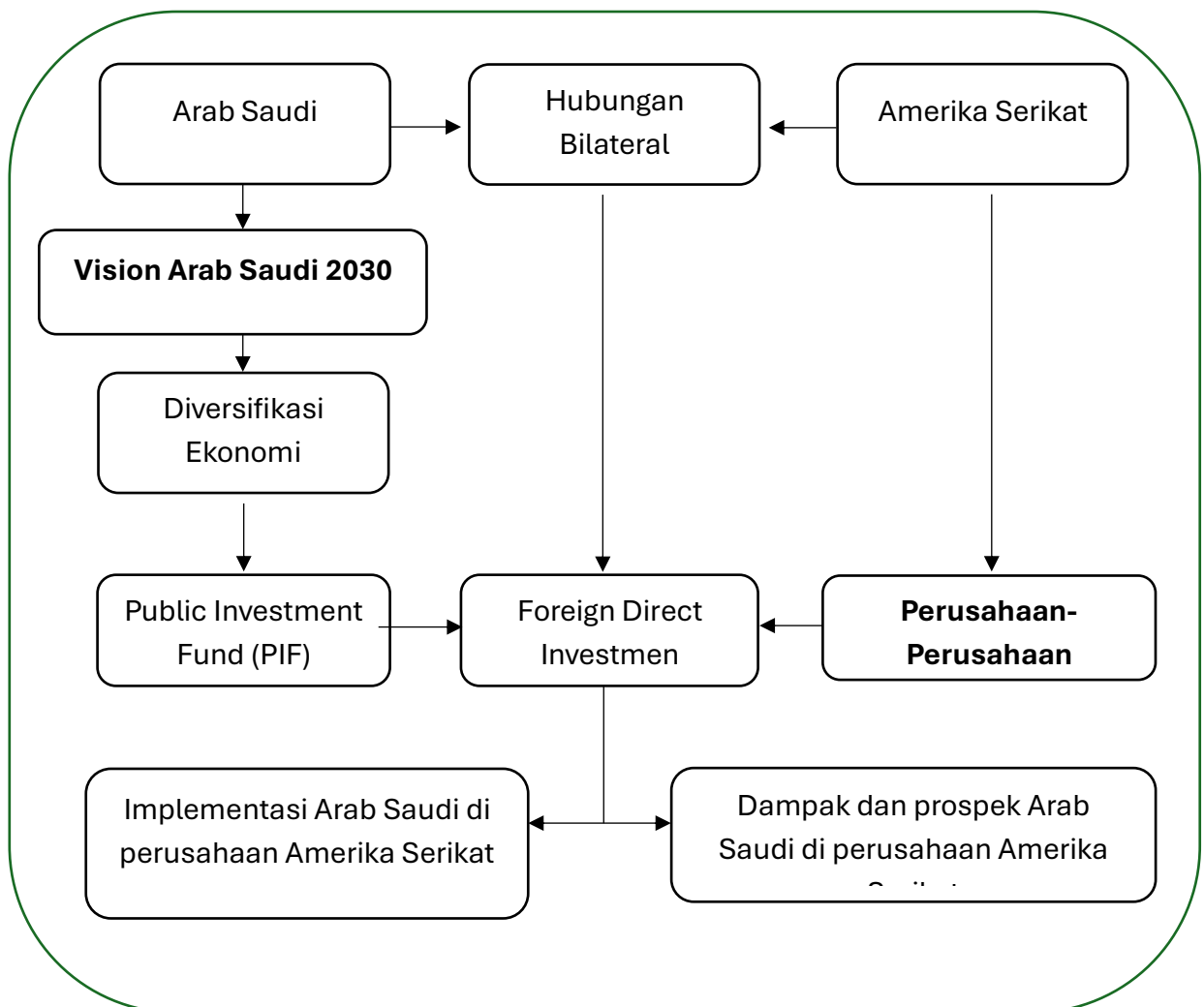
Terdapat tiga kondisi yang mendorong perusahaan untuk melakukan Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI). Pertama, perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Kedua, keputusan untuk melakukan FDI harus lebih menguntungkan dibandingkan menjual atau menyewakan aset tersebut. Ketiga, perusahaan harus dapat memanfaatkan keunggulan tersebut sehingga FDI menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.

Investasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam beberapa perusahaan akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi sebagai multinational enterprises (MNE), multinational corporations (MNC), atau transnational corporations (TNC). Oleh karena itu, teori ini memiliki hubungan yang erat dengan kerjasama yang dijalin oleh Arab Saudi.

Dunning (1993) menyatakan bahwa FDI merupakan investasi langsung yang bertujuan untuk memperoleh kontrol manajerial atas perusahaan asing. Dunning mengemukakan bahwa FDI berfokus pada tiga faktor utama: *Ownership* (kepemilikan), *Location* (lokasi), dan *Internalization* (internalisasi), yang dikenal sebagai OLI Framework. Dan **Blomström dan Kokko (1998)** berpendapat bahwa FDI tidak

hanya membawa modal, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan daya saing lokal. Investasi PIF dapat dipandang sebagai bentuk FDI yang strategis, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi. Melihat dari teori ini investasi PIF pengaruh terhadap mendukung tujuan Visi 2030 dan memfasilitasi transformasi ekonomi Arab Saudi.

d. Teori Skema



Sumber : Diolah oleh penulis.

Penelitian ini akan berpusat pada penggunaan teori hubungan bilateral, diversifikasi ekonomi dan Foreign Direct Investment untuk menganalisis kerjasama Public Investment Fund yang mewakili Arab Saudi yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang didukung oleh hubungan bilateral yang kuat. Dengan menggunakan konsep tersebut penelitian ini akan menganalisis impelentasi lalu dampak dan prospek yang dihasilkan dari kerjasama tersebut yang bertujuan dalam mewujudkan Visi 2030.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara detail sebuah fenomena serta aktor yang ada secara mendalam dengan memperoleh data sebanyak mungkin dan sesuai fakta di lapangan. Fenomena yang dimaksud yaitu Kerjasama investasi yang dilakukan oleh Arab Saudi. Selain itu Peneliti juga akan berfokus pada Fenomena Spesifik, yaitu Invesati Public Investmen Fund (PIF) Terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis Menggunakan jenis data sekunder dalam penelitian ini. Dengan pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu metode riset *literature research* (studi pustaka) dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh atau diambil oleh penulis berasal dari banyak sumber bacaan, layaknya buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, maupun tautan berita dengan sumber terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka dalam mencari dan menyatukan data, sumber terkait dengan investasi dan laporan tahunan PIF dengan menggabungkan data yang ada lalu memilah data agar sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis kualitatif. Teknik ini berfokus pada penggunaan fakta yang telah ada dan memilah lalu menggabungkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan dan analisis yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan alur sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan kedalam lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka yang berisi telaah pustaka terkait penelitian terdahulu yang bisa membantu penelitian sekaligus memberi gambaran pembeda penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Pada bab ini juga akan dipaparkan tinjauan pustaka terkait tiga konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama teori hubungan bilateral yang menjelaskan bagaimana hubungan dua negara demi mendapatkan kepentingan masing-masing lalu diversifikasi ekonomi yang menjelaskan adanya perilaku suatu negara yang meningkatkan aktivitas perekonomiannya untuk mengurangi keterbergantungan pada satu sektor saja. Kemudian konsep kedua yang akan digunakan dan dijelaskan pada bab ini adalah konsep Foreign Direct Investment (FDI). Dimana pada bab ini akan dijelaskan terkait definisi dan penjelasan lebih dalam mengenai Foreign Direct Investment (FDI).

BAB 3 Gambaran Umum berisi penjelasan secara umum terkait data dari variabel penelitian yang akan dianalisis. Pada bagian pertama akan dijelaskan secara general bagaimana sejarah ekonomi Arab Saudi, penjelasan mengenai Visi 2030 lalu peran Public Investment Fund (PIF) dalam Visi 2030 dan strategi investasi PIF. Penjelasan mengenai investasi Arab Saudi di Amerika Serikat pada bab ini juga menjelaskan hal yang menyebabkan terjadinya mengapa

melakukan investasi di Amerika Serikat. Kemudian isi dari gambaran umum dilanjutkan dengan menjelaskan di sektor dan perusahaan apa saja Arab Saudi yang diwakili oleh PIF untuk berinvestasi. Dalam penjelasan ini akan dijelaskan berbagai hal terkait mengenai bagaimana kerjasama perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan PIF di beberapa sektor strategis seperti teknologi, hiburan, mobilitas, keuangan, dan energi yang memiliki peluang untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi.

BAB 4 Pembahasan yang akan memberi penjelasan terkait hasil penelitian dan analisis yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis bagaimana dampak implementasi dari kerjasama yang dilakukan oleh PIF di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat lalu menganalisis prospek dari kerjasama investasi Arab Saudi dalam sektor Investasi yang diasumsikan merupakan kerjasama yang dapat membantu dalam mewujudkan Visi 2030

BAB 5 Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab keseluruhan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasannya akan berfokus pada kajian literatur terkait tiga konsep yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini. Yaitu penjelasan terkait kerjasama bilateral, penjelasan terkait diversifikasi ekonomi dan dan terakhir penjelasan terkait Foreign Direct Investment (FDI) dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya, dilakukan peninjauan terhadap literatur serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, yang dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian ini.

A. Hubungan Bilateral

Kerja sama bilateral adalah bentuk hubungan yang melibatkan dua negara dengan tujuan memenuhi kepentingan masing-masing serta mencapai tujuan bersama. Kerjasama bilateral merupakan hubungan antara dua negara yang mencakup bidang politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Sebagian besar kerja sama internasional dilakukan dalam bentuk bilateral. Sebagai alternatif, terdapat hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara, serta hubungan unilateral, di mana satu negara bertindak sesuai kehendaknya sendiri.

Menurut Holsti, kerja sama dan hubungan bilateral dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori berikut:

- 1) Keyakinan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan dapat bersinergi, menghasilkan sesuatu yang positif, serta menguntungkan semua pihak yang terlibat.
- 2) Kesepakatan antar dua negara atau lebih mengenai isu tertentu dengan tujuan memanfaatkan kesamaan kepentingan atau mengatasi konflik kepentingan.
- 3) Ekspektasi dari suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan mendukung pencapaian kepentingan dan nilai-nilainya.
- 4) Adanya aturan, baik formal maupun informal, yang mengatur interaksi di masa depan dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- 5) Pertukaran atau interaksi antar negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Kerja sama tidak akan terbentuk jika suatu negara mampu mencapai tujuannya sendiri. Dengan demikian, kerja sama muncul karena adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, setiap negara memiliki tujuan tertentu dalam membangun kerja sama bilateral. Oleh karena itu, masing-masing negara merumuskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasionalnya. Teori kerja sama bilateral mengacu pada prinsip bahwa negara-negara memiliki kepentingan untuk bekerja sama guna

mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai secara optimal tanpa kolaborasi. Dalam konteks ini, investasi Arab Saudi melalui Public Investment Fund (PIF) di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mencerminkan bentuk kerja sama bilateral yang berfokus pada sektor ekonomi.

Menurut Nye (1978), kerja sama antarnegara dapat terjadi ketika kedua belah pihak menyadari bahwa kolaborasi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan tindakan unilateral. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana Arab Saudi memanfaatkan investasi asing langsung (FDI) melalui PIF sebagai sarana memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan mendukung agenda domestik, yaitu Vision 2030. Kerja sama bilateral dalam investasi ini tidak hanya memperluas akses Arab Saudi ke teknologi dan inovasi, tetapi juga meningkatkan posisi strategisnya di kancah global.

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Sebagian besar interaksi berbentuk kerja sama terjadi antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi isu serupa secara bersamaan. Selain itu, terdapat model kerja sama lain yang dilakukan oleh negara-negara melalui organisasi dan perjanjian internasional.

Pembahasan kerja sama internasional dalam teori mencakup hubungan antara dua negara (bilateral) maupun hubungan antara unit yang lebih besar, yang dikenal sebagai multilateral. Meskipun bentuk kerja sama sering kali dimulai dengan dua negara, fokus utama dalam kerja sama internasional adalah pada multilateral. John Ruggie mendefinisikan multilateralisme sebagai bentuk

institusi yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang diterima secara umum. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai institusi, seperti organisasi internasional, rezim internasional, hingga konsep keteraturan global yang belum sepenuhnya terwujud.

Kerjasama multilateral bisa dilihat salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimana di dalamnya terdapat lebih dari dua negara yang membahas satu masalah tetapi yang menjadikan pembeda diantara bilateral dan multilateral dapat kita lihat dari isu yang dimana akan membahas lebih luas sehingga kerjasama sama ini cukup kompleks karena harus mementingkan kepentingan banyak pihak.

Kerjasama bilateral pada suatu negara memiliki berbagai macam kepentingan atau perjanjian dengan kedekatan suatu negara atau beberapa kerjasama bilateral yang telah menciptakan beberapa perjanjian diberbagai bidang sehingga dapat mempermudah suatu negara tersebut menjalin lebih banyak kerjasama. Seperti kerjasama perdagangan bebas dan investasi langsung asing (FDI) yang dimana dengan perjanjian bilateral memiliki efektifitas yang cukup tinggi dalam mencapai kepentingan setiap negara.

Menurut **Ravenhill (2017)**, ada tiga bentuk utama kerja sama bilateral yang umum:

1. Kerja Sama Ekonomi: Melibatkan investasi langsung, perdagangan, dan transfer teknologi.

2. Kerja Sama Politik: Fokus pada aliansi strategis untuk mendukung stabilitas regional atau global.
3. Kerja Sama Sosial-Budaya: Bertujuan memperkuat hubungan masyarakat melalui pendidikan, pariwisata, dan diplomasi budaya.

Arab Saudi dan Amerika Serikat terutama menonjol dalam kerja sama ekonomi, khususnya dalam bidang energi, teknologi, dan infrastruktur. Investasi PIF di perusahaan seperti Lucid Motors dan Uber mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara.

Kerjasama Arab Saudi dengan Amerika Serikat sudah berjalan cukup lama dari tahun 1943, sehingga berbagai macam kerjasama antara dua negara tersebut telah tercipta, salah satu kerjasama Arab Saudi saat ini yaitu kerjasama investasi langsung Asing di beberapa perusahaan Amerika Serikat dalam membantu Arab Saudi untuk mewujudkan Visi 2030.

Dalam konteks investasi, teori kerja sama bilateral sering dikaitkan dengan pendekatan mutual gains. Arab Saudi, melalui PIF, berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif seperti Uber dan Lucid Motors dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial sekaligus transfer teknologi. Dari perspektif Amerika Serikat, investasi ini memberikan tambahan modal signifikan yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Hubungan timbal balik ini mencerminkan prinsip kerja sama bilateral, di mana kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Keohane (1984), kerja sama bilateral dapat terjadi dalam lingkungan internasional yang saling tergantung (interdependence). Dalam hal ini, investasi PIF di perusahaan Amerika Serikat adalah langkah adaptif untuk merespons dinamika ekonomi global, seperti kebutuhan diversifikasi ekonomi Arab Saudi dan permintaan modal dari perusahaan Amerika Serikat.

Menurut Goldstein dan Pevehouse (2008), kerja sama bilateral juga dipengaruhi oleh tingkat interdependensi antarnegara. Negara-negara yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi, seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat, cenderung menjalin hubungan bilateral yang lebih erat untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hubungan tersebut. Dalam hubungan ekonomi, kerja sama bilateral sering kali diwujudkan melalui investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) atau pembentukan aliansi strategis di sektor tertentu.

Menurut Hocking dan Smith (1995), keberhasilan kerja sama bilateral sering dipengaruhi oleh dua faktor utama: (1) kepentingan nasional yang selaras, dan (2) hubungan diplomatik yang stabil. Arab Saudi dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang sejalan dalam memperkuat sektor teknologi dan energi bersih, yang tercermin dalam investasi besar PIF di perusahaan-perusahaan seperti Lucid Motors. Selain itu, hubungan diplomatik yang kuat antara kedua negara selama beberapa dekade terakhir memberikan landasan yang kokoh bagi kerja sama ekonomi, termasuk melalui investasi strategis

Menurut Theories of International Relations (JNU, 2021), pendekatan ini sering berakar pada teori liberalisme yang menekankan kerja sama sebagai sarana untuk memaksimalkan keuntungan bersama melalui integrasi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Dalam hal ini, Arab Saudi dan Amerika Serikat memiliki insentif bersama untuk memperkuat hubungan bilateral melalui investasi. Bagi Arab Saudi, investasi ini memungkinkan:

1. Transfer Teknologi: Mengakses teknologi kendaraan listrik dari Lucid Motors untuk mendukung transisi ke energi terbarukan.
2. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada minyak melalui investasi di sektor transportasi berbasis teknologi seperti Uber.
3. Peningkatan Kapasitas Domestik: Memanfaatkan pengetahuan dan inovasi perusahaan multinasional (MNE) untuk membangun industri dalam negeri.

Berdasarkan teori kerja sama bilateral, investasi PIF di perusahaan Amerika Serikat merupakan langkah strategis yang menggabungkan kepentingan nasional Arab Saudi dengan peluang yang ditawarkan oleh pasar Amerika Serikat. Hal ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara, mendukung diversifikasi ekonomi Arab Saudi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan.

B. Konsep Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi pertumbuhan (Imbs & Wacziarg, 2003). Dalam teori ini, diversifikasi bertujuan untuk memperluas basis ekonomi, meningkatkan daya tahan terhadap fluktuasi eksternal, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Acemoglu & Zilibotti, 1997).

Diversifikasi Ekonomi sangatlah penting karena negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam sering kali menghadapi masalah ketergantungan ekonomi, seperti:

1. Volatilitas Ekonomi: Harga komoditas seperti minyak cenderung fluktuatif, sehingga ketergantungan terhadapnya dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan negara (Gelb, 2010).
2. Dutch Disease: Ketergantungan pada ekspor sumber daya alam dapat melemahkan sektor manufaktur atau jasa karena apresiasi mata uang domestik yang berlebihan (Ross, 2012)
3. Ketahanan Ekonomi: Diversifikasi membantu negara menciptakan sumber pendapatan baru, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan berbasis inovasi (Callen. T, 2014).

Bagi Arab Saudi, strategi diversifikasi ekonomi menjadi sangat relevan karena ketergantungan negara pada pendapatan dari sektor minyak yang rentan terhadap volatilitas harga global. Melalui inisiatif Visi 2030, Arab Saudi

berusaha membangun ekonomi yang lebih seimbang dengan fokus pada sektor teknologi, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur. Public Investment Fund (PIF) berperan sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan ini, dengan mengalokasikan investasi strategis pada perusahaan multinasional yang mendukung diversifikasi ekonomi.

Setiap negara yang melakukan diversifikasi ekonomi dapat dilihat dari beberapa pendekatan utama, yang memiliki fokus dan pandangan yang berbeda dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional seperti berikut :

1. Diversifikasi Horizontal

Diversifikasi horizontal melibatkan pengembangan sektor-sektor baru yang tidak terkait langsung dengan sektor dominan. Dalam hal ini, Arab Saudi berinvestasi di berbagai bidang seperti pariwisata, hiburan, dan energi terbarukan sebagai upaya menciptakan sumber pendapatan baru. (Callen. T, 2014).

2. Diversifikasi Vertikal

Diversifikasi vertikal adalah pengembangan sektor yang terkait dengan sektor utama ekonomi, misalnya melalui peningkatan hilirisasi industri minyak dan gas menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. (Ross, 2012).

Dalam konteks teori diversifikasi ekonomi, investasi PIF di perusahaan seperti Lucid Motors dan Uber Technologies mencerminkan upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi baru yang berpotensi menjadi andalan di

masa depan. Investasi PIF di Lucid Motors, misalnya, mendukung transisi energi Arab Saudi dengan mengembangkan teknologi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada minyak tetapi juga memperkuat posisi Arab Saudi dalam industri kendaraan listrik global, yang diproyeksikan tumbuh pesat di dekade mendatang (PIF Official Website, 2024).

Sementara itu, investasi PIF di Uber Technologies membawa Arab Saudi ke dalam sektor teknologi transportasi berbasis digital. Investasi ini relevan dengan rencana pengembangan kota pintar (smart cities) yang menjadi salah satu fokus Visi 2030. Dengan mendukung Uber, PIF memperoleh akses ke teknologi transportasi yang dapat diterapkan di proyek-proyek domestik seperti Neom dan The Line, yang dirancang untuk menjadi ikon modernisasi Arab Saudi.

Teori diversifikasi ekonomi juga menekankan pentingnya memperluas sumber pendapatan negara melalui inovasi dan integrasi teknologi. Dalam hal ini, investasi PIF di perusahaan multinasional Amerika Serikat mencerminkan respons adaptif terhadap tantangan global, seperti transisi energi dan digitalisasi ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi dari perusahaan multinasional tersebut, Arab Saudi dapat memperkuat sektor domestik yang sesuai dengan tujuan diversifikasi, seperti energi terbarukan, transportasi, dan pariwisata berbasis teknologi.

Menurut Imbs dan Wacziarg (2003), diversifikasi ekonomi tidak hanya menciptakan stabilitas jangka panjang tetapi juga membuka peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing globalnya. Arab Saudi, melalui investasi PIF, menunjukkan bahwa diversifikasi bukan hanya tentang mengurangi risiko ekonomi tetapi juga tentang menciptakan masa depan ekonomi yang inklusif dan inovatif. Dalam halnya penelitian ini, PIF berusaha melakukan diversifikasi ekonomi Arab Saudi berdasarkan Saudi Vision 2030 dengan membagi-bagi asset sumber ekonomi Arab Saudi ke berbagai sektor

C. Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) adalah bentuk investasi lintas negara di mana investor asing mendapatkan kepemilikan atau kendali substansial atas perusahaan di negara tujuan. Menurut Markusen (1995), FDI mencakup investasi jangka panjang yang melibatkan transfer modal, teknologi, dan keahlian manajerial. FDI dibedakan dari portofolio investasi karena investor berperan aktif dalam manajemen dan operasional perusahaan.

Investasi langsung luar negeri (FDI) dapat didefinisikan sebagai penanaman modal jangka panjang ke dalam perusahaan yang beroperasi di negara lain. FDI merupakan karakteristik utama dari sistem ekonomi global yang saling terhubung. FDI sering dianggap lebih bermanfaat bagi perekonomian negara penerima dibandingkan investasi dalam bentuk ekuitas karena investasi ekuitas cenderung bersifat jangka pendek. Selain itu, investasi

ekuitas memiliki risiko terjadinya aliran modal keluar secara tiba-tiba (capital outflow), yang dapat meningkatkan kerentanan ekonomi negara penerima.

Investasi langsung luar negeri tidak hanya melibatkan transfer kepemilikan dari entitas domestik ke investor asing tetapi juga berfungsi sebagai sarana bagi investor untuk mempelajari aspek-aspek manajemen dan pengendalian perusahaan lokal, khususnya dalam konteks mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance mechanism).

Investasi langsung luar negeri (FDI) mencakup dua jenis utama, yaitu inward dan outward. Inward foreign direct investment mengacu pada investasi yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan outward foreign direct investment merujuk pada investasi yang dilakukan ke negara lain. FDI terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya secara jangka panjang pada perusahaan di negara lain. Melalui mekanisme ini, perusahaan dari negara asal (home country) dapat memengaruhi operasi dan pengelolaan perusahaan di negara tujuan investasi (host country), baik sebagian maupun sepenuhnya. Dalam konteks ini, Amerika Serikat berperan ganda sebagai home country sekaligus host country, bergantung pada dinamika investasi yang terjadi.

Foreign direct investment (FDI) dapat dilakukan dengan membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan di negara tujuan.

Menurut Dunning (1993) dalam paradigma OLI (Ownership, Location, Internalization), terdapat tiga motivasi utama yang mendorong FDI:

1. Ownership Advantage (O): PIF memiliki modal besar dan keahlian investasi di sektor strategis. Kepemilikan saham signifikan di perusahaan seperti Lucid Motors memungkinkan PIF mengakses teknologi dan inovasi yang mendukung diversifikasi ekonomi Arab Saudi.
2. Location Advantage (L): Investasi PIF di Amerika Serikat mencerminkan daya tarik lokasi ini sebagai pasar terbesar dunia dengan infrastruktur inovasi yang mapan. Menurut Markusen dan Venables (1999), lokasi dengan daya tarik teknologi tinggi sering kali menjadi tujuan utama FDI karena memberikan sinergi yang optimal antara investor dan negara tuan rumah..
3. Internalization Advantage (I): Tidak hanya menjadi investor pasif, PIF memilih untuk berperan aktif dengan mengambil kendali atas strategi bisnis. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi PIF untuk memanfaatkan kemampuan global perusahaan seperti Lucid Motors, yang memiliki rencana membangun fasilitas produksi di Arab Saudi, sejalan dengan visi strategis Vision 2030.

FDI sering digunakan sebagai strategi pembangunan ekonomi, khususnya oleh negara-negara berkembang, karena dapat memberikan manfaat seperti

penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas inovasi lokal (Markusen, 1995).

Sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi yang diinisiasi oleh Vision 2030, Arab Saudi menggunakan FDI untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan mempercepat pengembangan sektor non-migas. Public Investment Fund (PIF), sebagai salah satu pilar utama Visi 2030, memainkan peran strategis dalam berinvestasi di perusahaan-perusahaan multinasional berbasis teknologi dan inovasi di Amerika Serikat. Investasi ini tidak hanya membawa keuntungan finansial tetapi juga mendorong transfer teknologi dan pengembangan keterampilan lokal.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian skripsi peneliti melakukan literature review pada 4 penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan topik penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai program Saudi Vision 2030 dari berbagai penelitian mengenai hal ini.

Pertama, Penelitian yang berjudul "**Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia**" oleh Neflita Sianturi menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori liberalisme dan konsep FDI. Penelitian ini mengkaji rendahnya tingkat investasi Arab Saudi di Indonesia dan bagaimana pengaruh program reformasi sosial ekonomi Saudi Vision 2030 terhadap peningkatan aktivitas investasi tersebut di

Indonesia. Peneliti bertujuan untuk melihat dampak reformasi ini dalam memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.

Pada kunjungan Raja Salman ke Indonesia, Arab Saudi mengajukan tawaran kerjasama senilai 25 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak di Cilacap, Dumai, dan Balongan, serta proyek perumahan murah dan pariwisata. Meskipun hubungan Indonesia dan Arab Saudi selama ini terbatas pada aspek agama yang mengatur umrah dan haji, kerjasama ini menunjukkan perluasan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Penelitian menunjukkan bahwa investasi yang terealisasi dari Arab Saudi di Indonesia hanya mencapai US\$900 ribu atau sekitar 11,9 miliar rupiah, jauh lebih rendah dari yang sebelumnya dijanjikan sebesar 25 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Saudi Vision 2030 diluncurkan, realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak Saudi Vision 2030 terhadap investasi di Indonesia, sedangkan saya lebih tertarik pada aspek FDI Arab Saudi secara umum yang dimana saya memfokuskan bagaimana implementasi, dampak dan prospek kerjasama Arab Saudi dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang investasi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Chen Juan, Shu Meng, dan Wen Shao Biao berjudul "**Aligning China's Belt and Road Initiative with Saudi Arabia's 2030 Vision**" menggunakan pendekatan kualitatif untuk

mengeksplorasi penyelarasan program Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok dengan Saudi Vision 2030. Jurnal ini menyoroti bagaimana Arab Saudi melihat kerjasama dalam proyek BRI sebagai peluang untuk mencapai tujuan Vision 2030. Bagi Tiongkok, Arab Saudi memiliki peran strategis sebagai penghubung ke kawasan Eurasia dan pasar Afrika yang luas.

Dalam penelitian ini terfokuskan dalam runtut hubungan bilateral antara China dan Arab Saudi serta kerjasama yang dilakukan. Seperti pembangunan zona industri di Jazan serta perusahaan China Nuclear Engineering and Construction Group (CNECGC) melakukan kerjasama dengan Reaktor Berpendingin Gas Suhu Tinggi Saudi dengan Saudi Nuclear and Renewable Energy City. Perdagangan kedua negara juga tidak kalah baik, lebih dari 100 perusahaan milik China telah berinvestasi di Arab Saudi. Pada tahun 2016 volume perdagangan kedua negara mencapai \$42,4 miliar.

Meskipun terdapat banyak pencapaian dalam kerjasama antara Tiongkok dan Arab Saudi, jurnal ini menyoroti beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti manajemen risiko dalam kemitraan tersebut. Perubahan pangeran penerus tahta oleh Raja Salman sebanyak dua kali menjadi perhatian terkait stabilitas politik Arab Saudi. Selain itu, dominasi sektor minyak dan minimnya partisipasi sektor swasta dalam perekonomian Arab Saudi menjadi pertimbangan penting. Memburuknya hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Timur Tengah juga berpotensi menghambat penyelarasan BRI Tiongkok dengan Vision 2030.

Jurnal ini memaparkan pandangan ahli dari Tiongkok mengenai Vision 2030 Arab Saudi. Beberapa ahli menilai program ini positif namun mempertanyakan kemampuan Arab Saudi dalam merealisasikannya, terutama karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya jiwa kewirausahaan di masyarakatnya, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Sebagai bentuk dukungan, Tiongkok melalui kunjungan Presiden Xi Jinping ke Arab Saudi pada 2017, menandatangani kerja sama di sektor non-migas seperti kedirgantaraan dan komunikasi untuk mendukung pencapaian visi tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tiongkok perlu mempertimbangkan strategi dalam menyelaraskan Belt and Road Initiative (BRI) dengan Vision 2030 Arab Saudi, terutama mengingat perbedaan budaya dan peraturan ketat di Arab Saudi. Budaya Arab Saudi yang asing bagi masyarakat Tiongkok membuat pertukaran budaya menjadi penting. Rekomendasi mencakup penyelenggaraan festival kenegaraan, kerja sama dalam pendidikan, teknologi, dan penelitian bersama di bidang sejarah, budaya, serta teknologi. Fokus penelitian ini adalah pada penyelarasan BRI dengan Vision 2030, yang hampir sama dengan penelitian saya yang dimana bedanya penelitian saya memfokuskan dengan kerjasama Amerika di bidang investasi.

Ketiga, Penelitian berjudul "**Cultural Diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the Context of the Vision 2030 Strategy Implementation**" oleh N.O. Konopka dan T.L. Strykhotyskiy menggunakan metode kualitatif

dengan teori diplomasi budaya dan soft power. Penelitian ini menyoroti bagaimana Arab Saudi berusaha memulihkan citranya di dunia Barat setelah kasus-kasus kontroversial seperti pembunuhan J. Khashoggi dan krisis kemanusiaan di Yaman. Saudi Vision 2030 (2017) dan Cultural Vision (2019) menjadi instrumen reformasi yang bertujuan merevitalisasi budaya modern Saudi untuk mendukung diversifikasi ekonomi dan memperkuat identitas nasional.

Salah satu elemen utama dalam diplomasi budaya Arab Saudi adalah penerbitan Al-Qur'an, yang dikelola oleh Kompleks Penerbitan Al-Qur'an Raja Fahd di Madinah. Lembaga ini menegaskan peran Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Islam dan memperkuat reputasi Raja Saudi sebagai Penjaga Dua Masjid Suci. Sejak didirikan pada 1985, Kompleks ini telah menerbitkan lebih dari 323 juta eksemplar Al-Qur'an dalam berbagai bahasa dan format, termasuk digital dan audio. Pada tahun 2018 saja, lebih dari 18 juta eksemplar dicetak untuk distribusi global.

Arab Saudi telah mengimplementasikan berbagai program budaya, termasuk pameran seni dan buku tingkat regional serta internasional. Pusat Internasional Raja Abdullah bin Abdulaziz untuk Dialog Antar Agama dan Antar Budaya (KAICIID) yang didirikan pada 2012, menjadi inisiatif utama untuk mendorong dialog antarbudaya. Dalam mendukung strategi Vision 2030, Kementerian Kebudayaan yang dibentuk pada 2019 memainkan peran sentral dalam menciptakan masyarakat dinamis dan ekonomi yang sejahtera. Selain

itu, sektor pariwisata menjadi fokus utama, dengan target investasi sebesar \$64 miliar dalam pengembangan hiburan untuk menarik 100 juta wisatawan per tahun pada 2030. Melalui Strategi Pariwisata Nasional dan Tourism Development Fund, pemerintah berharap kontribusi pariwisata meningkat dari 3% menjadi 10% dari PDB, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru. Upaya ini menunjukkan bagaimana sektor budaya dan pariwisata digunakan sebagai alat untuk diversifikasi ekonomi dan transformasi sosial di Arab Saudi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Arab Saudi memiliki keunggulan dalam meningkatkan soft power melalui bobot agama, kekuatan ekonomi, dan stabilitas politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah berupaya mengubah citra konservatifnya dengan memanfaatkan statusnya sebagai pusat Islam dunia untuk mendukung diplomasi budaya dan mengembangkan wisata religi. Beberapa inisiatif budaya penting termasuk pembentukan Cultural Development Fund, peluncuran proyek seni seperti Art Residence Al-Balad, serta promosi seni dan warisan melalui museum dan film. Sementara penelitian ini fokus pada implementasi Saudi Vision dalam sektor budaya melalui analisis soft power dan diplomasi budaya, penelitian saya lebih menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi melalui investasi PIF dalam kerangka Vision 2030. Hal ini menunjukkan perbedaan fokus dalam mendalami berbagai aspek transformasi Arab Saudi di bawah Vision 2030.

Keempat, Penelitian yang berjudul "**Pengaruh Akuisisi Newcastle United oleh Public Investment Fund (PIF) Terhadap Saudi Vision 2030**" oleh Dwi Maden Obet menganalisis bagaimana langkah PIF dalam mengakuisisi klub sepak bola Newcastle United berkontribusi terhadap tujuan Vision 2030 Arab Saudi. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana investasi di sektor olahraga ini merupakan bagian dari strategi Arab Saudi untuk mendiversifikasi perekonomian negara, mengurangi ketergantungan pada minyak, serta meningkatkan citra global. Akuisisi Newcastle United diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap sektor hiburan dan pariwisata, yang merupakan sektor utama dalam Vision 2030.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji hubungan antara investasi PIF di klub sepak bola dengan dua pilar utama Vision 2030: menciptakan masyarakat dinamis dan memperkuat ekonomi yang lebih berkembang. PIF, sebagai instrumen utama dalam menjalankan kebijakan ekonomi Arab Saudi, diposisikan untuk memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya tarik sektor hiburan, dan mempromosikan Arab Saudi sebagai destinasi internasional di luar sektor minyak.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa akuisisi Newcastle United tidak hanya memperluas pengaruh Saudi di dunia internasional tetapi juga mendukung pencapaian dua pilar utama Vision 2030, yaitu pembangunan masyarakat yang dinamis dan ekonomi yang berkembang. Ini menunjukkan

bahwa sektor olahraga, melalui PIF, berperan penting dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkenalkan Arab Saudi ke pasar global, yang lebih luas dari sekadar sektor energi. Kedua penelitian ini berfokus pada peran PIF dalam mencapai tujuan Vision 2030, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih mengarah pada sektor olahraga sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi Arab Saudi, sedangkan penelitian saya memusatkan perhatian pada investasi PIF di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.